



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/134/K/411.012/2021

TENTANG

PEMBERIAN DISINSENTIF KEPADA PT. ALAM RAYA AMERTA SUBUR MAKMUR  
DALAM PEMANFAATAN RUANG UNTUK INDUSTRI ROKOK DI KELURAHAM  
MANGUNDIKARAN KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 - 2030, arahan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah sebagai kebijakan tata ruang di Kabupaten Nganjuk dilaksanakan melalui pemberian insentif dan disinsentif;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang untuk industri di Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 48 Tahun 2020, maka Disinsentif diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemberian Disinsentif kepada PT. Alam Raya Amerta Subur Makmur Dalam Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Rokok Di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

Bv

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Di Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 48 Tahun 2020;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DISINSENTIF KEPADA PT. ALAM RAYA AMERTA SUBUR MAKMUR DALAM PEMANFAATAN RUANG UNTUK INDUSTRI ROKOK DI KELURAHAN MANGUNDIKARAN KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK.**



- KESATU : Memberikan Disinsentif kepada PT. Alam Raya Amerta Subur Makmur Dalam Pemanfaatan Ruang untuk Industri Rokok di Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Berdasarkan berita acara Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam Rapat Pembahasan Pemberian Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang untuk Industri di Kabupaten Nganjuk pada Tanggal 29 Maret 2021, setelah melalui hasil kajian aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan yang dituangkan dalam berita acara Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), ditetapkan Keputusan Bupati untuk Pemberian Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang Kabupaten Nganjuk kepada PT. Alam Raya Amerta Subur Makmur.
- KETIGA : Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terhadap PT. Alam Raya Amerta Subur Makmur meliputi :
- a. Penambahan Beban Pajak Daerah  
Membayar penambahan beban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) industri sebesar 24% (dua puluh empat persen) selama 1 (satu) tahun pajak yang akan dibayarkan sekaligus dengan berpedoman pada penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Pembayaran penambahan beban tersebut disetor ke Kas Umum Daerah masuk pada Kegiatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan kode rekening (0191000355).
  - b. Pembatasan Penyediaan Infrastruktur  
Pemohon dibebani penanaman pohon di tepi jalan dan pembuatan drainase sesuai kebutuhan lingkungan.
  - c. Pengenaan Kompensasi
    1. Pemohon dikenakan kompensasi berupa uang yang harus dibayarkan melalui Kas Umum Daerah sebagai pengganti penyediaan sarana prasarana untuk memperkuat struktur ruang dan mendukung pola ruang sesuai rencana tata ruang wilayah, sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembayaran pengenaan kompensasi tersebut disetor ke Kas Umum Daerah masuk pada Kegiatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan kode rekening (0191000355), dan dibayarkan paling lambat

By

30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan ini.

2. Penerimaan kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi Pendapatan Asli Daerah.

d. Usulan Pencabutan Izin

Usulan pencabutan izin sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang untuk industri di Kabupaten Nganjuk

e. Pinalti

1. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas lahan diluar lokasi yang diajukan izin dalam wilayah Kabupaten Nganjuk dan diserahkan asetnya berupa hak atas tanahnya kepada Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum Daerah;
2. Penyediaan dan Pengelolaan resapan air;
3. Penyediaan dan Pengelolaan Lingkungan.

KEEMPAT : Kesanggupan melaksanakan disinsentif oleh PT. Alam Raya Amerta Subur Makmur dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan yang dicatatkan pada Notaris dalam wilayah kerja Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 6 Juli 2021

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001

By